

SKRIPSI

TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



**OLEH:
ANDI MAULANA ARIF NUR
B 111 11 309**

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN
OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**OLEH
ANDI MAULANA ARIF NUR
B 111 11 309**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MAULANA ARIF NUR

B111 11 309

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 6 Agustus 2015
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua,




Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H, M.H, M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI MAULANA ARIF NUR

No. Pokok : B 111 11 309

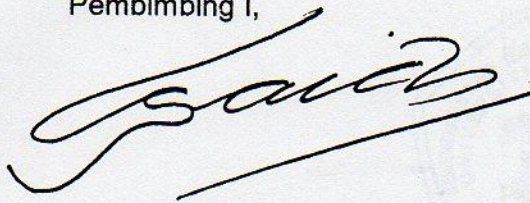
Bagian : HUKUM ACARA

Judul Skripsi : TINJAUAN NORMATIF KEWENANGAN
PENUNTUTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 Juli 2015

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H. M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ANDI MAULANA ARIF NUR**
No. Pokok : B111 11 309
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindak Pidana
Pencucian Uang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2015

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

ANDI MAULANA ARIF NUR, B11111309, Judul Skripsi “Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Atas Tindak Pidana Pencucian Uang, di bawah bimbingan M. Said Karim selaku Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak ada aturan yang menjelaskan secara valid dasar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ataupun dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak ada yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. (2) Dimasa yang akan datang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selayaknya dan sudah sepatutnya diberikan hak dan wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan double-track criminality dimana ada tindak pidana asal dan lanjutan sehingga tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi wajib dituntut oleh komisi pemberantasan korupsi. Hal ini guna mencapai 3 tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arifin Kulle dan Ibunda Andi Sitti Syahrinur yang tidak pernah henti-hentinya memberi kasih sayang, dukungan baik moril maupun materiil, nasihat, dan doa sehingga

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Beliau adalah Orang Tua terbaik yang ada sekali seumur hidup. Kepadamulah kupersembahkan karya ini.

Kepada saudaraku, Hani Afdhaliah dan Muhaimin Hidayat Arif Nur dan seluruh keluarga besar yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya, kalian semua adalah motivator penulis, jasa-jasa kalian sangat membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis juga haturkan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan, dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis.

5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ketua dan Sekretaris Bagian Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Ibu Dr., Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS).
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dalam pengurusan berkas kuliah hingga berkas ujian skripsi.
10. Staff Administrasi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk meminjam referensi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2011 (Mediasi) FH-UH, terimakasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan.

12. Teman-teman *Asian Law Students' Association* (ALSA), khususnya
ALSA LC UNHAS dan ALSA se-Indonesia pada umumnya. ALSA
ALWAYS BE ONE.
13. Kakak-kakak dan teman-teman pengurus ALSA LC UNHAS periode
2011-2012 terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang
diberikan selama ini.
14. Teman-teman dan adik-adik pengurus ALSA LC UNHAS Periode
2012-2013, terkhusus untuk saudara BOD dan BPH, Dayat,
Fadlhan, Dede, Rachmi, Dedet, Afdal, Juwi, Ismi, Chakin, Fika, Iin
dan Rifka terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya
selama ini.
15. Keluarga *National Moot Court Competition* (NMCC) ALSA Piala
Mahkamah Agung RI 2013 Win.Win.Win.Champion di Malang, Kak
Ridwan, Kak Zul, Kak Tadin, Kak Adi, Kak Jumardi, Kak Nurmi,
Dayat, Anggi, Lestari, Fika, Dini, Rini, Nita, Iin, Oji, Rudi dan Lisa
terima kasih atas bimbingan dan pelajaran berharga yang tidak
mungkin akan dilupakan oleh penulis
16. Keluarga *National Moot Court Competition* (NMCC) ALSA Piala
Mahkamah Agung RI 2014 Disiplin, Kerja Keras, JUARA di Jember,
Dayat, Helvi, Afdal, Juwi, Adong, Resa, Lisa, Afdalis, Wahyu, Nhoe,
Hj. Dian, Tjoteng, Feny, Tita, Yanuar, Irsad, Khaiffah, Oji,
terimakasih atas kepercayaannya kepada penulis untuk memimpin
tim meskipun kita tidak JUARA dan mendapatkan piala Mahkamah

Agung, penulis berharap kita semua akan bertemu sebagai JUARA dimasa depan.

17. Adik-Adik Local Moot Court Competition ALSA LC UNHAS tahun 2013-2014, Gusti, Taufik, Dirwan, Febri, Cikal, Fatur, Yanneri, Eko, Adi, Ummu, Wiwi, Cecil, Fitri, Firda, Nida, dan Nullin terima kasih telah mau dibimbing oleh penulis semoga ilmu yang diberikan oleh penulis dapat bermanfaat nantinya.

18. Teman-teman Hakim Mahkamah Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (MKM FH-UH) Periode 2014-2015 Prandy, Afdal, Helvi dan Gustia, terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

19. Teman-teman KKN Reguler angkatan 87 Desa Pongka, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone Lestin, Erwin, Intan, Jean, Ishyfa, Mia terimakasih atas kerjasamanya selama KKN.

20. Teman-teman Jenesys 2.0 Mass Media 4th Batch terkhusus untuk Felix, Akbar, Bisma terima kasih atas perjalanan yang tak akan dilupakan oleh penulis di Negeri Sakura, Jepang.

21. Kakak-Kakakku, Kak Nursal, Kak Adi, Kak Fadhil, Kak Zaldy, Kak Iswan, Kak Anto, Kak Ippank, Kak Uga, Kak Thyzar, Kak Firda, Kak Zul, Kak Ridwan, Kak Tadin, Kak Jumardi, Kak Adi, Kak Vikar dan Kak Aso terima kasih atas bimbingannya terkhusus untuk kakak yang saya ucapkan namanya dua kali Kak Fadhil terima kasih telah mengajarkan penulis untuk bermimpi dan menjadi seorang

mahasiswa hukum yang berintegritas, Kak Ridwan dan Kak Tadin terima kasih telah mengajarkan penulis untuk menjadi mahasiswa hukum sejati dan pendekar hukum ALSA.

22. Dan yang paling terakhir yang paling spesial untuk Rima Islami Putri terima kasih atas support serta semangat yang tidak henti-hentinya diberikan, penulis tidak pernah tahu apa alasan Tuhan mempertemukan kita dan kita pun tak berhak tahu apa alasan Tuhan tersebut, intinya penulis yakin bahwa Tuhan selalu mempunyai jalan yang baik untuk hubungan kita, semoga Tuhan selalu melindungi kita.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan adanya kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi teknik penulisannya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Penulis,

Andi Maulana Arif Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 9
A. Pengertian Tinjauan Normatif	9
B. Penuntutan	11
1. Pengertian Pra-Penuntutan	11
2. Pengertian Penuntutan	13
3. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penuntutan	18
C. Sejarah dan Perkembangan dan Pengertian Pencucian Uang	26
1. Sejarah Perkembangan Pencucian Uang	26
2. Pengertian Pencucian Uang	35
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	39
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	39
2. Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Pencucian Uang	48

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Analisis Data	54
 BAB IV PEMBAHASAN	 55
A. Dasar Hukum Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang	 55
B. Kedudukan Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang	 70
 BAB V PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan dimasyarakat dikarenakan banyak pendapat yang akan muncul mulai dari pendapat orang awam mengenai hukum hingga pendapat orang yang fasih akan hukum, mulai dari pendapat seorang siswa sekolah hingga pendapat seorang mahasiswa serta mulai dari pendapat seorang akademisi hingga pendapat seorang praktisi hukum. Hal ini membuat hukum memiliki keberagaman dalam sudut pandang, apakah hukum itu ada untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan ataukah kepastian, tentunya hal tersebut sangat menarik untuk dibahas. Pastinya dalam keberagaman pandangan mengenai hukum tentunya tidak akan lepas untuk membicarakan masalah dalam hukum itu sendiri apakah hukum itu saling tumpang tindih atau hukum melakukan suatu yang overlap.

Pada tahun 2013 terjadi kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat.¹ Kasus suap impor daging sapi dimana perkara di perankan 5 terdakwa pada saat itu yakni Arya Abdi Effendi, Juardi Effendi, Elizabeth Liman, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Kasus ini bermula ketika pertemuan antara Ahmad Fathanah direktur utama PT Atlas Jaringan Satu yang merupakan orang kepercayaan dari Luthfi Hasan

¹ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor register perkara 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

Ishaaq selaku komisaris PT Atlas Jaringan Satu bersama Elizabeth Liman selaku direktur utama PT Indoguna Utama untuk membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, tetapi pengajuan penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama ditolak oleh Menteri Pertanian setelah saat itu mereka mencoba keluar pada sistem yang ada pada saat itu. Kalau kita mengikuti kasus tersebut ada beberapa hal yang membuat kasus ini cukup menarik yakni yang pertama mulai dari penyidikan hingga proses penuntutan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kedua selain daripada itu untuk terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq bersama Ahmad Fathanah mereka berdua didakwa oleh jaksa penuntut umum KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

- Kesatu : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Kedua : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Ketiga : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 3 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dan

Dakwaan Ketiga : Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dan

Dakwaan Keempat: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Dan

Dakwaan Kelima : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP²

Kalau kita melihat secara seksama dakwaan yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) terhadap Luthfi Hasan Ishaaq beserta Ahmad Fathanah maka, selain dari tindak pidana korupsi mereka berdua juga didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari sini kita dapat melihat bahwa hal yang menarik adalah Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah memang Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menuntut perkara selain daripada tindak pidana korupsi? Padahal dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak dijelaskan apakah KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI boleh melakukan penuntutan selain daripada perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya aturan dalam hukum pidana terbagi atas 2 bagian yakni hukum pidana materiil yang dapat disebut sebagai hukum pidana yang abstrak dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan

² *Ibid*

diam yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formiil atau yang biasa disebut dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³ Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang yang bersifat materiil (*substantif*) ataupun Undang-Undang yang bersifat formiil (*prosedural*) tidak digabungkan dalam satu peraturan perundang-undangan seperti antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia sendiri memiliki banyak undang-undang yang bersifat formiil dan materiil digabungkan dalam satu perundang-undangan yang sama. Contohnya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan lain-lain. Akibatnya banyak masalah hukum yang timbul mulai saling tumpang tindihnya pasal yang satu dengan yang lainnya, terjadinya overlapping dalam proses hukum.

³ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm. 2-3

Undang-Undang yang dibuat pada dasarnya mengandung norma sebagai berikut :⁴

- a. **Mandator**, memerintahkan untuk melakukan sesuatu (perintah), biasanya ada kata “wajib”, “dapat”, “berwenang”.
- b. **Prohibitor**, perintah untuk tidak melakukan sesuatu (larangan), biasanya ada kata “dilarang”.

Karakter larangan, jika tidak dilarang berarti dibolehkan”, jadi jika membuat larangan haruslah rinci dan apabila suatu aturan dilaksanakan secara mandator, lalu subjeknya adalah pejabat public maka yang dirumuskan adalah operatornya, wajib atau berwenang tapi bila subjeknya adalah orang atau badan hukum maka yang dirumuskan adalah wajib.

Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN NORMATIF PENUNTUTAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tindak pidana pencucian uang?

⁴ <http://hukummulia.blogspot.com/2009/04/hukum-per-undang-undangan.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2015

2. Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang atas kewenangan melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan Penulis membahas Tinjauan normatif terhadap pengajuan peninjauan kembali dalam hubungannya dengan asas keadilan adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dari penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang atas kewenangan melakukan penuntutan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun manfaat yang diharapkan Penulis dari tulisan ini adalah:

1. Agar hasil penulisan ini memberikan sumbangan teoretis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu hukum khususnya hukum acara pidana;
2. Agar hasil penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama terlebih lagi buat pribadi penulis;

3. Agar hasil penulisan ini menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan hukum nasional dan juga menjadi pertimbangan buat *Law Enformance* dalam rangka menegakkan hukum;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Normatif

Kajian Normatif merupakan kajian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).⁵ Harus diketahui bahwa asas hukum yang melahirkan norma hukum, dan norma hukum yang melahirkan aturan. Dari satu asas hukum dapat melahirkan lebih dari satu norma hukum hingga tak terhingga norma hukum, dan dari satu norma hukum dapat melahirkan lebih dari satu aturan hukum hingga tak terhingga aturan hukum.

Pada dasarnya dalam tinjauan normatif kita tidak membahas apa yang nampak dalam suatu aturan tapi apa yang berada dibelakang suatu aturan. Misalnya saja pada kasus praperadilan yang sangat hangat dibahas pada awal tahun 2015 di Indonesia. Pada Bab X bagian Kesatu KUHAP dijelaskan mengenai praperadilan yang pada pokoknya berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang⁶,

⁵ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana. Hlm. 178

⁶ Lihat pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tetapi pada kasus praperadilan Budi Gunawan yang menjadi objek untuk dipraperadilan ialah penetapan sebagai tersangka padahal hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam KUHAP. Tapi apabila kita bandingkan dengan beberapa norma yang selalu menjadi dasar setiap aturan yakni :

- **Mandator**, memerintahkan untuk melakukan sesuatu (perintah), biasanya ada kata “wajib”, “dapat”, “berwenang”.
- **Prohibitor**, perintah untuk tidak melakukan sesuatu (larangan), biasanya ada kata “dilarang”.

Karakter larangan, jika tidak dilarang berarti dibolehkan, jadi jika membuat larangan haruslah rinci dan apabila suatu aturan dilaksanakan secara mandator, lalu subjeknya adalah pejabat publik maka yang dirumuskan adalah operatornya, wajib atau berwenang tapi bila subjeknya adalah orang atau badan hukum maka yang dirumuskan adalah wajib. Jadi pada dasarnya ketika penetapan tersangka jika dibahas ataupun dijadikan objek praperadilan itu tidak bertentangan norma hukum.

Berdasarkan pendapat diatas maka tinjauan normatif merupakan kajian yang tidak membahas mengenai apa yang nampak dari suatu aturan tapi apa yang berada dibelakang suatu aturan yakni norma.

B. Penuntutan

1. Pengertian Pra-Penuntutan

Apa yang disebut sebagai pra-penuntutan ? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan suatu istilah baru tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya tidak memberi batasan pengertian pra-penuntutan itu. Di dalam pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi pra-penuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin. Kalau kita telaah Pasal 14 KUHAP tentang pra-penuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa pra-penuntutan terletak antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik⁷.

Kalau demikian, menjadi pertanyaan apakah perbedaan antara pra-penuntutan dan penyidikan lanjutan? Keduanya menempati tempat yang sama. Sebenarnya yang dimaksud dengan istilah pra-penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal,

⁷ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 157

karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut pra-penuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) termasuk penyidikan lanjutan. Menurut A.Hamzah bahwa pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut pra-penuntutan, lalu petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam.⁸

Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi penasihat hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut beserta pasal-pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim barulah hal itu sesuai untuk disebut pra-penuntutan. Pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) butir e Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra-penuntutan.

Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas

⁸ *Ibid.* Hlm. 158

perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.⁹

2. Pengertian Penuntutan

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan yakni sebagai berikut¹⁰ :

“penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”

Definisi tersebut mirip dengan definisi penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisinya beliau menyebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak. Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah *“menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”*¹¹

⁹ Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana . Hlm. 159

¹⁰ Lihat pada pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung. Hlm. 34

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Masalah dalam praktik (sewaktu HIR juga masih berlaku) apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya?” Diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu. Contohnya adalah apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapa pun dalam daerah hukum kejaksaan tinggi itu ? dan sebagai konsekuensinya apakah juga seorang jaksa di Kejaksaan Agung berwenang menuntut siapa pun diseluruh Indonesia? KUHAP tidak menjawab masalah ini dan penjelasan Pasal 137 itu mengatakan “cukup jelas”.

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa keluarga atau penasihat hukum, pejabat

rumah tahanan negaram penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut dalam pasal 76,77, dan 78 KUHP¹² (*non bis in idem*, terdakwa meninggal dan lewat waktu). Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara, tidak berlaku asas *non bis in idem*.

Selanjutnya pada pasal 141 bahwa penuntu umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatas dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannyam yang

¹² *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Repbulik Indonesia, cetakan ke-2, Hlm. 88. Dimuat dalam Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.163

dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntut umum dapat memecahkan perkara menjadi lebih dariapda satu. Hal itu diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Penjelasan Pasal 142 mengatakan cukup jelas, tetapi Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru di mana pada tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan sebagai berikut :

“Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan splitsing itu? Dalam hubungan ini, maka penyidiklah yang melaksanakan splitsing atas petunjuk penuntut umum. Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah ialah bahwa masalah splitsing ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan.”¹³

Menurut Andi Hamzah bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat. Tidak selalu perkara yang dipecah (*splitsing*) harus diperiksa kembali. Munkgin kalau tidak ada saksi, sedangkan ada beberapa orang tersangka hal demikian benar,

¹³ *Ibid.* Hlm. 165.

artinya tersangka bergantian menjadi saksi. Tetapi hal demikian sesungguhnya dapat menimbulkan kemungkinan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan tersangka (terdakwa), karena pada gilirannya ia sendiri juga akan menjadi tersangka (terdakwa). Lalu tidak seluruhnya yang ditulis oleh pembuat pelaksanaan Pedoman KUHAP itu, karena tidak selalu dalam memecah perkara perlu pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa tersangka (terdakwa) dan juga ada beberapa orang saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, di mana daftar nama tersangka (terdakwa) diubah menjadi sendiri-sendiri, dan pemeriksaan saksi-saksi tetap.¹⁴

Penuntut umum dapat langsung memecah berkas perkara tersebut menjadi beberapa buah. Yang perlu diminta dari penyidik ialah duplikat hasil pemeriksaan. Sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk dipecah menjadi beberapa berkas perkara itu harus bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat. Jadi seharusnya dibedakan perkara yang tidak lengkap (saksinya kurang) sehingga harus dipecah dimana para tersangka saling menjadi saksi yang harus diselesaikan melalui Pasal 138 KUHAP, dengan pemecahan perkara menjadi lebih dariapda satu tanpa menambah pemeriksaan, oleh karena itu penuntut umum dapat langsung melakukannya. Bergantian menjadis saksi itu bukanlah saksi mahkota. Saksi mahkota berarti salah

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.cit.*, Hlm 165.

seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi seperti diberi mahkota, yang tidak akan diadika terdakwa lagi.¹⁵

3. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penuntutan.

a. Kejaksaan.

Berdasarkan buku *Lima Windu Sejarah Kejaksaan RI 1945-1985* yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI, bahwasanya kata “Jaksa” berasal dari bahasa Sanskerta Adhyaksa, yang dalam perkembangannya sampai saat ini telah memiliki suatu doktrin yang dikenal dengan nama “*Tri Krama Adhyaksa*” yaitu *Satya, Adhi, Wicaksana*. Adapun pengertian Satya, Adhi dan Wicaksana adalah sebagai berikut¹⁶ :

- *Satya* yaitu kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- *Adhi* yaitu kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab bertanggung jawab, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga maupun terhadap sesama manusia.
- *Wicaksana* yaitu bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 165-166.

¹⁶ Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Op.cit.*, Hlm. 93.

Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut pasal 1 angka 6 KUHP, sebagai berikut :

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁸

Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan :

- Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 6 poin a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 6 poin b a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kemudian pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan mengenai kedudukan kejaksaan atau penuntut umum yakni Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain daripada itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak terdapat sesuatu keteentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan penuntut umum hanya disebutkan dan diatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah :

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melaksanakan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) . Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun wewenang penuntut umum sebagaimana diatur menurut pasal 14 KUHAP, sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan

ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan babaik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain¹⁹ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuang undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum, sebagaimana didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan

¹⁹ Yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti iidentitas; tersangka, barang bukti dengan memerhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidikm penuntut umum dan pengadilan lihat penjelasan pasal 14 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat²⁰

b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

Salah satu risalah menimbang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Itu adalah salah satu alasan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi hadir di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun²¹. Pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk menindaklanjuti ataupun

²⁰ Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op.cit.*, Hlm. 101

²¹ Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

menghilangkan seluruh kegiatan korupsi yang ada di Indonesia namun pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut :

- a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) Supervisi terhadap instansi yang berwenagn melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penyalidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan
- e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Seperti yang kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki tugas untuk melakukan penuntutan tapi hanya khusus pada tindak pidana korupsi berbeda dengan Kejaksaan. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana selain

daripada aturan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ada adagium yang menyatakan bahwa jaksa adalah *domitus litis* dalam penuntutan terdakwa²²

Namun pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, instansi KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI dibolehkan untuk mengambil alih tindakan penyidikan dan penuntutan dengan alasan sebagai berikut :

- a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Penanganan tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsure korupsi;
- e) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

²² Andi Hamzah. *Op.cit.*, Hlm 166

Berdasarkan hal tersebut diatas Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan aturan khusus yakni dapat mengambil alih penuntutan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak yang berwenang untuk menuntut suatu perkara namun hanya pada tindak pidana korupsi hal ini juga sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia yakni asas *Lex Specialis De Rogat Legi Generalis* dimana aturan yang khusus akan diutamakan daripada ketentuan yang lebih umum.

C. Sejarah Perkembangan dan Pengertian Pencucian Uang

1. Sejarah Perkembangan Pencucian Uang

Dari banyak literatur diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak decade 1920-an. Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam suatu kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya.²³

Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk menguburkan asal-usul harta kekayaan. Sifat dasar tindak pidana itu sendiri secara umum, berupaya memperoleh keuntungan keuangan dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara, pelaku tindak pidana berupaya untuk menjadi sosok yang baik

²³ Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia. Hlm. 3

dan tidak seorangpun yang diharapkannya beranggapan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana. Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas legal.

Pembelian aset (*Property*), menyimpannya dalam sistem keuangan atau bahkan mendirikan usaha bisnis agar dapat memiliki landasan dalam menikmati keuntungan dari aktivitas pidananya.²⁴ Pada dasarnya, tidak ada diantara kita semua yang berkenan melihat seseorang menikmati kehidupan dengan memperoleh dana atau harta kekayaan secara illegal. Oleh karena itu baik tindak pidana yang dilakukan sebagai pidana asalnya ataupun tindakan memanfaatkan dana yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sudah seharusnya dapat dikenakan ppidanaaan yang berbeda.

Problematic pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*Money Laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Ternyata, problematic uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang

²⁴*Ibid*

tanpa menyadari dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela.

Al Capone, penjahat terbesar Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si Genius **Meyer Lansky**, orang Polandia. **Lansky**, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan **Al Capone** melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama "*money laundering*"²⁵. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya, Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian uang atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan keperusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Pada saat yang hampir bersamaan, karena pemberlakuan prinsip rahasia bank di Swiss pada awal tahun 1930-an, pencucian uang memperoleh pijakan kokoh. Petinggi-petinggi militer Nazi Jerman melakukan pencucian uang dengan

²⁵ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 1

memanfaatkan prinsip rahasia bank di Swiss.²⁶ Pada saat itu Swiss tidak mengkategorikan penggelapan dan pengelakan pajak (*Tax Evasion*) sebagai suatu kejahatan, sehingga siapapun yang menyimpan uang di bank-bank Swiss tidak akan banyak ditanya soal itu. Identitas nasabah hanya menjadi otoritas direktur bank. Hanya direktur bank yang mengetahui siapa nasabah pemilik nomor tersebut. Oleh karena itu, identitas nasabah hanya berupa nomor kode.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkoba dan obat bius yang mencapai miliaran rupiah. Karenanya, kemudian muncul istilah "*narco dollar*", yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkoba²⁷. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian yang atau

²⁶ Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. *Op.cit.*, Hlm. 7

²⁷ A.S. Mamoedin. 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Rafflesia. Hlm. 291-292.

bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.

Berdasarkan statistik IMF²⁸, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hamper mencapai nilai sebesar US\$. 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated Press* kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi, dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun ini berarti sama dengan 5% GDP seluruh dunia.

Menurut **Michael Camdessus** (*Managing Director* IMF), memperkirakan volume dari *cross-border money laundering* adalah antara 2% sampai dengan 5% dari *gross domestic product* (GDP) dunia. Bahkan, batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari kegiatan *narcotics trafficking*, *arm trafficking*, *bank fraud*, *securities fraud*, *counterfeiting*, dan kejahatan yang sejenis dengan kejahatan tersebut, dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hamper US\$ 600 miliar²⁹. Selain itu, menurut *Financial Action Task Force* (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun diseluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trade*) berkisar antara US\$ 300 miliar dan US\$ 500 miliar.

²⁸ Adrian Sutedi. Op.cit., Hlm. 2.

²⁹ *Ibid* Hlm. 3

Silih berganti kehidupan manusia diwarnai oleh kebakan dan kejahatan. Eksistensi kejahatan seiring dengan kehidupan. Ketertiban dan keadilan menjadi ukuran dan dambaan sempurnanya kehidupan. Ketika terjadi kejahatan, keteriban menjadi terganggu. Dan ketika pelaku kejahatan tidak berhasil diberi ganjaran hukuman, keadilan menjadi terusik. Hukum kemudian menjadi faktor pencegah serta sarana untuk mengembalikan ketertiban dan memberikan keadilan serta menghukum mereka yang dianggap bersalah. Kendati demikian tetap saja kejahatan tidak sepenuhnya dapat dipunahkan. Berbagai faktor, yang bersifat kompleks, menjadi penyebab kejahatan tetap terjadi hingga hari ini.

Hukum harus ditegakkan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan dan memenjarakan pelakunya, karena adanya kesepakatan masyarakat mengenai penghukuman inilah kemudian pelaku curang ataupun pelaku kejahatan berupaya untuk menghindari berhadapan dengan hukum, tentunya upaya penghindaran ini dilakukan dengan berbagai cara. Pelaku curang atau jahat selalu berupaya untuk menyembunyikan perbuatannya, hasil kejahatan serta berupaya mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukannya bahkan guna memperlancar tindakan curang lainnya atau mengembangkan dan meningkatkan target keuntungan dari perbuatan curang atau jahatnya di kemudian hari.

Kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan secara terus-menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang

yang tidak sedikit. Uang hasil kejahatan diibaratkan seperti darah yang member kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, karena uang tersebut dialirkan kembali untuk bisnis kejahatan, sehingga bisnis kejahatan dapat terus berjalan selama dari setiap tatanan kehidupan manusia, baik dalam berbuat jahat ataupun dalam kehidupan normal (baik). Pada dasarnya, orang yang menerima uang sebagai ganjaran dari prestasi atau pekerjaan yang dilakukannya. Uang tidak dapat diperoleh tanpa bekerja ataupun mengelola suatu usaha untuk meraih keuntungan (*benefit oriented*).³⁰ Di satu sisi, tidak ada satu jenis kehidupan pun yang menyatakan menerima perbuatan buruk atau criminal sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan untuk dilakukan. Prinsip ekonomi serta tertutupnya perbuatan jahat bagi tatanan kehidupan manusia, dua hal yang memaksa pelaku tindak kejahatan untuk menjelaskan asal muasal dana yang diperolehnya. Tentunya pelaku kejahatan termotivasi untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya, lalu bagaimana menjelaskan bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah merupakan hasil dari perputaran roda ekonomi, bahwa itu hasil pekerjaan yang *legitimate*? Pencucian uanglah jawabannya.

Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya.

³⁰ Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. *Op.cit.*, Hlm. 6

Pencucian uang mungkin sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri.³¹ Dengan prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan, pelaku kejahatan akan selalu dapat menghidupkan dan melestarikan kegiatan kriminalnya. Dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal akan mampu membiaya aktivitas kejahatan dan menumbuhkannya sehingga menjadi semakin besar serta terorganisir dengan baik. Perkembangan kejahatan dari sisi organisasi, modus dan skala operasi akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat.

Kelompok-kelompok kejahatan didunia seperti *Medelin Cartel* (Kolombia), Mafia (di Italia dan Amerika Serikat), atau orang-orang yang terlibat dalam penipuan (*fraud*), penyelundup senjata, sangat memanfaatkan sistem keuangan. Kejahatan-Kejahatan besar tersebut menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan. Negara mengalami kerugian financial yang sangat besar akibat pencucian uang dari kegiatan legal atau kejahatan. Masyarakat yang melakukan aktivitas usaha legal, dengan beban ekonomi seperti harga penjualan, suku cadang, pembangunan pabrik, biaya buruh, dan lain sebagainya, akan kalah bersaing dengan pabrik, biaya buruh, dan lain sebagainya, akan kalah bersaing dengan usaha sejenis yang diciptakan hanya untuk menutupi kegiatan kriminal sesungguhnya.³²

Pemberantasan pencucian dengan jalan mengkriminalisasi, pada awalnya berlingkup nasional dengan kejahatan asal yang beragam.

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.* Hlm. 8

Amerika Serikat telah lama mengatur soal pencucian uang, namun penuntutan hukum terhadap pencucian uang di pengadilan, baru terjadi ditahun 1982 dalam kasus United States vs. US\$ 4.255,625,39³³. Suatu kasus yang unik karena pemerintah Amerika Serikat tidak berhasil menghadirkan orang yang melakukan pencucian uang, Pemerintah Amerika Serikat hanya berhasil menyita uangnya. Ini adalah kasus pencucian uang pertama yang diajukan ke muka pengadilan. Kemudian, kasus ini menjadi titik awal pemberantasan pencucian uang di Amerika Serikat. Karena kasus ini, pencucian uang kemudian menjadi terminologi hukum.

Upaya memerangi pencucian uang, pada awalnya dilakukan secara bilateral diantara negara yang menjadi tempat asal dana kejahatan dengan negara yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Dalam perkembangannya, pemberantasan pencucian uang secara bilateral dirasakan tidak memadai dan efektif, sehingga perlu diperluas ke tingkat multilateral. Kerja sama-kerja sama multilateral dimaksudkan untuk mempersempit dan membuka *blank spot* wilayah-wilayah anti pencucian uang dimanapun di dunia. Pada saat ini pencucian uang sudah merupakan fenomena dunia dan tantangan internasional. Semua negara sepakat, bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas melalui kerja sama antarnegara.

³³ Carl Edward Ty Williams. 1998. *The Effects of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty of Confidentiality*. Canada : CARSWELL, a division of Thomson Canada. Hlm. 9

Gerakan internasional untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi *The International Convention Against Transnational Organized Crime* yang lebih populer disebut *The Palermo Convention*.³⁴ Resolusi itu dibuat PBB karena menyadari besarnya ancaman bahaya narkoba terhadap negara-negara di dunia. Inti dari substansi Konvensi Palermo adalah mengharuskan semua negara anggota PBB mengkriminalisasi semua kejahatan yang menjadi kejahatan asal pencucian uang.

2. Pengertian Pencucian Uang

Sebenarnya, tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan

³⁴ Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. *Op.cit.*, Hlm.9.

yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³⁵ Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotik, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Selain daripada itu terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang. Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya).³⁶ Tidak jauh berbeda dengan pengertian itu, Sarah N. Weiling mengemukakan pengertian *money laundering* sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber illegal atau aplikasi illegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah.³⁷ Weiling menekankan bahwa pencucian

³⁵ Adrian Sutedi. *Op.cit.*, Hlm. 12

³⁶ Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn : West Publishing Co. Hlm 884. Diterjemahkan oleh Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. Dalam bukunya *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Hlm. 10

³⁷ Sarah N. Weiling. *Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam : Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. 1992. *The Money Trail*

uang adalah proses mengaburkan, menyembunyikan uang-uang ilegal melalui sistem keuangan sehingga ia akan muncul kembali sebagai uang yang sah. Senada dengan pendapat diatas, Pamela H.Bucy mengemukakan pengertian pencucian uang sebagai penyembunyian keberadaan, sifat atau sumber ilegal, pergerakan atau kepemilikan uang demi alasan apapun.³⁸

Money Laundering secara harfiah juga diistilahkan dengan pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, ada yang menyebutnya sebagai *dirty money*, *hot money*, *illegal money*, atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Tampaknya terdapat universalisme pada konsep uang dalam istilah *money laundering* atau pencucian uang yaitu uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Artinya hanya uang-uang yang demikian yang dicuci dalam sistem keuangan.

Dari beberapa definisi penjelasan mengenai apa yang dimaksud pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah

(*Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting*). Sydney : The Law Book Company Limited. Hlm. 201. Diterjemahkan oleh Adiwarman,Arman Nefi,Ivan Yustiavandana. Dalam bukunya *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*.

³⁸ Pamela H. Bucy. 1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*, St.Paul, Minnesota : West Publishing Co. Hlm. 228 Diterjemahkan oleh Adiwarman,Arman Nefi,Ivan Yustiavandana. Dalam bukunya *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*.

kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.³⁹ Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkotik, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.

Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal. Melalui pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal, tapi pada dasarnya pencucian uang dimaksudkan untuk melegalkan uang hasil kejahatan

³⁹ Adrian Sutedi. *Op.cit.*, Hlm. 15

yang dimasukkan ke dalam sistem keuangan, sehingga kemudian dapat ditarik dan dimasukkan kembali tanpa kesulitan.⁴⁰

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah ada 3 aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yakni sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembentukan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dilatar belakangi oleh berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi, baik dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut, antara lain, berupa tindak pidana korupsi; penyuapan (*bribery*) ; penyelundupan barang, tenaga kerja, dan imigran; perbankan; perdagangan gelap narkoba dan psikotropika; perdagangan budak, wanita, dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; dan berbagai kejahatan kerah putih. Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kekayaan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui

⁴⁰ Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. *Op.cit.*, Hlm. 11

sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Sehubungan dalam hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional, baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Dalam konteks kepentingan nasional ditetapkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, melainkan bagian dari penyelesaian masalah, baik disektor ekonomi, keuangan, maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang

melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :⁴¹

1. **Penempatan (*placement*)** yakni upaya menempatkan uang tunai uang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. **Transfer (*layering*)** yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain.
3. **Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)** yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*). Untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

⁴¹ Adrian Sutedi. *Op.cit.*, Hlm. 5

Adapun mengenai pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut⁴² :

- Kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara;
- Asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
- Perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat di minimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
- Pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral;

**B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang**

⁴² Lihat risalah menimbang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional ataupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana pencucian uang.

Berkenaan dengan hal tersebut , dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Perubahan dalam undang-undang ini, antara lain, meliputi :⁴³

1. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan, tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan

⁴³ *Ibid.* Hlm. 9

keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat, tetapi belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau nilai yang setara diperoleh dari tindak pidana dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak bergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.
4. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan di mana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak dipidana.

5. Jangak waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsure transaksi keuangan mencurigakanm hal ni dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
6. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tippingoff*). Hal ini dimaksudkan, antara lain, untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum(*mutual legal assistance*) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerma dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbale balik merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang. Kerja sama internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral, tetapi juga regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisasi. dicantumkannya “*asas double criminality*” dalam rancangan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang yang baru saja disetujui untuk ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang merupakan salah satu asas yang selama ini berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yakni bahwa seseorang yang melakukansuatu perbuatan pidana disuatu negara, hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di Indonesia. Lalu adanya larangan bagi pejabat atau pegawai penyedia jasa keuangan memberitahukan kepada orang lain atau kepada pengguna keuangan mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.⁴⁴

⁴⁴ Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 16 september 2003 dicetak oleh Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 11-12

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pertimbangan yakni sebagai berikut⁴⁵ :

- Agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar nasional.

C. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Memasuki tahun 2005 Kejahatan Pencucian Uang tetap saja tidak dapat tuntas sehingga pemerintah menganggap bahwa peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang masih dinilai mempunyai celah sehingga pada tahun 2010 dibentuklah Undang-Undang baru mengenai tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dibentuk dengan pertimbangan yakni sebagai berikut⁴⁶ :

⁴⁵ Lihat risalah menimbang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁴⁶ Lihat risalah menimbang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

2. Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Pencucian Uang

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan, sehingga pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Pidana asal tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Contohnya misalnya di Negara

A, perjudian tidak termasuk dalam tindak criminal, karenanya uang hasil perjudian yang dimasukkan kedalam sistem keuangan tidak dapat dikategorikan sebagai pencucian uang⁴⁷. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.⁴⁸ Pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

Ada beberapa pertimbangan tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti tindak pidana terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Reuter dan Truman (2004) berdasarkan hasil penelitiannya memasukkan lima macam kejahatan asal (*predicate offence*) yaitu perdagangan narkoba, kejahatan-kejahatan kerah biru (kejahatan tingkat menengah), kejahatan kerah putih, penyuapan dan korupsi serta terorisme. Alasan Reuter dan Truman memilih kejahatan-kejahatan ini sebagai asal pencucian uang adalah

⁴⁷ Adiwarman, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. 2010. *Op.cit.*, Hlm. 55

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No.3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), Hlm. 19

adanya homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut yaitu dampaknya sangat merusak terhadap masyarakat.⁴⁹

Dampak kejahatan asal tindak pidana pencucian uang bersifat multi aspek. Pada tindak pidana terorisme misalnya, terjadi kerusakan fisik dan lingkungan sekitar kejadian, korban meninggal dan cacat, trauma kejiwaan serta hancurnya modal sosial masyarakat sekitar seperti hilangnya kepercayaan terhadap orang asing, sikap tolong menolong. Untuk itu, pemberantasan tindak pidana terorisme harus dibarengi dengan tindak pidana pencucian uang untuk menghentikan pembiayaan tindak pidana terorisme.

Kejahatan kerah putih tidak kalah berbahaya dan merugikannya bagi masyarakat dan negara dibandingkan tindak pidana terorisme. Kerugian finansial kejahatan kerah putih harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan. Negara akan kekurangan dana untuk mengadakan fasilitas dan layanan bagi masyarakat akibat korupsi.

Dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang menyebutkan sejumlah tindak pidana asal untuk pencucian uang hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagai berikut⁵⁰ :

⁴⁹ Michael Levi and Peter Reuter. 2006. *Money Laundering*. Chicago : The University of Chicago Press. Hlm. 25. Diterjemahkan secara bebas oleh Adiwarmanto, Arman Nefi, Ivan Yustiavandana. Dalam *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Hlm.55.

⁵⁰ Lihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Di bidang perbankan;
- g. Di bidang Pasar Modal;
- h. Di bidang asuransi;
- i. Narkotika;
- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan manusia;
- l. Perdagangan senjata gelap;
- m. Penculikan;
- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;

- x. Dibidang kelautan; atau
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Ada 25 jumlah tindak pidana asal untuk pencucian uang hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terbentuk maka ada beberapa tambahan tindak pidana asal untuk pencucian uang yakni sebagai berikut :

- a. Kepabeanaan;
- b. Cukai;
- c. Dibidang kelautan dan perikanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian Penulis memilih lokasi penelitian di Perpustakaan di Universitas Hasanuddin dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data penelitian ini adalah:

Penelitian Pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang

Petito Principii atau mengajukan pertanyaan adalah salah satu sophisme yang dicatat Aristoteles; mengajukan pertanyaan atau lebih tepatnya, memperkirakan pertanyaan adalah menggunakan dalil yang tengah diperdebatkan, seolah-olah dalil itu sudah terbukti kebenarannya.⁵¹ Hal tersebut jika kita kaitkan dengan kasus suap impor daging Luthfi Hasan Ishaq dimana instansi penegak hukum yang memulai penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini memang biasa saja tetapi menjadi luar biasa ketika Komisi Pemberantasan Korupsi juga menuntut Luthfi Hasan Ishaq dengan dakwaan tindak pidana selain dari Tindak Pidana Korupsi yakni Tindak Pidana Pencucian uang. Terlepas dari Luthfi Hasan Ishaq banyak pejabat-pejabat negara yang kemudian didakwa oleh komisi pemberantasan korupsi dengan dakwaan selain dari tindak pidana korupsi yakni tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah kasus Nazaruddin, Djoko Susilo dan lain sebagainya, hal ini kemudian sangat

⁵¹ Jeremy Bentham. 2013. *Teori Perundang-Undangan*. Bandung : Nuansa Cendekia dan Nusamedia. Hlm. 106

aneh karena secara fundamental Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka timbul pertanyaan apakah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana selain daripada tindak pidana korupsi.

Pencucian uang atau bisa kita sebut sebagai money laundering merupakan hal yang baru di Indonesia, konsepsi mengenai pencucian uang bisa kita bilang sebagai konsep baru sebuah kejahatan di Indonesia tetapi meskipun terbilang relatif baru di Indonesia, sudah banyak perbincangan hangat terkait dengan indikasi praktik pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat negara. Selain dari hal pencucian uang sorotan juga mulai mengarah kepada dunia peradilan yakni mengenai penanganan kasus korupsi. Bagaimana kemudian terdakwa terbukti bersalah atau sebaliknya tidak terbukti bersalah yang diajukan ke sebuah persidangan disertai dengan tuntutan kerugian negara.

Dugaan dilakukannya praktik pencucian uang mulai banyak terlihat, ditambah dengan eksistensi dari pengadilan tipikor yang mulai mencuat atau menunjukkan keberadaannya melalui beberapa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan terhadap beberapa pemangku jabatan negara, terkait dengan pencucian uang. Penanganan tindak pidana pencucian uang pun baru dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002.

Didalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, konsep pencucian uang telah ditetapkan secara deksriptif dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 1 angka 1, yakni sebagai berikut :

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”

Definisi mengenai pencucian uang sangat penting dikarenakan berkaitan dengan berbagai kejahatan atau dapat kita katakan sebagai kejahatan ganda dimana terdapat kejahatan asal dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan. Berbicara mengenai kejahatan ganda dimana tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (Predicate Crime) dan harus diawali terlebih dahulu dengan tindak pidana utama atau tindak pidana asal (Core Crime). Terlebih kita harus melihat tindak pidana apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana utama atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri.

Peraturan terbaru dari tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian menjelaskan tindak pidana apa saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana asal (Core Crime) yakni pada pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

1. Korupsi;

2. Penyuapan;
3. Narkotika;
4. Psikotropika;
5. Penyelundupan tenaga kerja;
6. Penyelundupan migran;
7. Di bidang perbankan;
8. Di bidang pasar modal;
9. Di bidang perasuransian;
10. Kepabeanan;
11. Cukai;
12. Perdagangan orang;
13. Perdagangan senjata gelap;
14. Terorisme;
15. Penculikan;
16. Pencurian;
17. Penggelapan;
18. Penipuan;
19. Pemalsuan uang;
20. Perjudian;
21. Prostitusi;
22. Di bidang perpajakan;
23. Di bidang kehutanan;
24. Di bidang lingkungan hidup;

25. Di bidang kelautan dan perikanan; atau

26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada dasarnya masih memiliki banyak kelemahan meskipun peraturan ini merupakan peraturan kedua setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kelemahan-kelemahan tersebut yang kemudian timbul memicu kritikan yang cukup banyak dari para pakar hukum itu sendiri mulai dari segi teori, segi konsep ataupun pada tataran praktisnya, misalnya dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan bahwa Penyidikan tindak Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau diperhatikan secara seksama pasal-pasal tersebut bisa saling tumpang-

tindih nantinya, bagaimana mungkin kita dapat menentukan bahwa penyidik dari tindak pidana pencucian uang itu adalah penyidik darimana kalau kita tidak perlu terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya, alangkah lucu jika kemudian tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian berasal dari tindak pidana cukai sementara yang melakukan penyidikan adalah penyidik dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Namun, dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan tindak pidana asal, yang dimaksud dengan tindak pidana asal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁵² Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan

⁵² Lihat Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang apabila tindak pidana pencucian uang itu berasal atau predicate crimenya merupakan tindak pidana korupsi..

Berbeda halnya mengenai penuntutan atas tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang tidak dijelaskan secara eksplisit siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang baik menjelaskan bahwa

- (1) Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.

Apabila kita melihat dan memperhatikan secara seksama pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menuliskan redaksi kata penuntut umum, dalam penjelasan pasal 76 tersebut hanya menuliskan “cukup jelas”. Namun, apabila kita melihat pengertian penuntut umum sebagaimana yang dijelaskan secara definitif dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang yaitu

penuntut umum secara definitif dimana penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam pasal 6 huruf b KUHAP menjelaskan bahwa penuntut umum merupakan jaksa hal ini juga termaktub dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Setelah melihat pengertian penuntut umum yang dijelaskan secara definitif baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ataupun dalam KUHAP maka definisi penuntut umum yang dimaksud dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengacu pada KUHAP, bahwa kemudian penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang. Pada dasarnya di Indonesia jaksa hanya bekerja pada instansi kejaksaan saja namun seiring perkembangan waktu maka kemudian jaksa tidak hanya bekerja pada instansi kejaksaan saja tetapi juga bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁵³ Jika kita melihat secara seksama maka tujuan dibentuknya komisi pemberantasan korupsi untuk menangani perkara tindak pidana korupsi baik itu pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan proses penuntutan dalam tindak pidana korupsi, hal ini telah sesuai

⁵³ Lihat risalah menimbang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

dengan apa yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yakni sebagai berikut :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada Pasal 6 poin c sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi pada dasarnya hanya memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini juga tidak menyebutkan kewenangan lain Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, meskipun penyelesaian perkara penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian dalam pengadilan tindak pidana korupsi membolehkan untuk diselesaikannya perkara penuntutan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana korupsi⁵⁴ tetapi hanya instansi komisi pemberantasan saja yang berhak untuk melakukan penyelesaian perkara dalam pengadilan tindak pidana korupsi, jawabannya tentu tidak, instansi penegak hukum seperti kejaksaan pun bisa. Jadi pada dasarnya Undang-

⁵⁴ Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sama sekali tidak menjelaskan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Berbicara mengenai kewenangan pada dasarnya kewenangan atau gezag memiliki arti yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang⁵⁵. Definisi tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Peter de Haan yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit tetapi ditentukan oleh suatu Undang-Undang (*Overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*)⁵⁶. Sebagai konsep hukum public, menurut Philippus M. Hadjon, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku dari subjek hukum;
2. Dasar Hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;

⁵⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. Jurnal Pro Justitia*, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.

⁵⁶ P. de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtstaat, Deel 1*, Kluwer, Deventer, Tahun 1986 ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.

3. Konformitas Hukum bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵⁷

Akibat dari tidak adanya Undang-Undang dan aturan yang mendasari sebab dari Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang baik dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri kewenangan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga *superbody*.

Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan dua hakim yang melakukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan 3 hakim lainnya dalam putusan sela pada persidangan atas nama terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dengan nomor register 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tertanggal 09 Desember 2013, yakni Hakim I Made Hendra dan Joko Subagyo. Dalam putusan selanya mereka menyatakan,⁵⁸ “berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga itu bertugas menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Jurnal *Pro Justitia*, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998. ditulis oleh I Made Hendra Kusuma dalam Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014 Hal 49.

⁵⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hoc-persoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu> diakses pada tanggal 26 April 2015

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas Tindak Pidana Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur instansi mana yang berwenang melakukan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara khusus mengenai penuntut umum yang menyidangkan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, merujuk pada ketentuan KUHAP. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 13 UU No 8 Tahun 2010. “Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penuntut umum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan atas Tindak Pidana Pencucian Uang adalah jaksa. Hal mana dipertegas dalam Pasal 71 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Pasal 71 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan harus ditandatangani oleh a. Koordinator penyidik untuk tingkat penyidikan. b. Kepala Kejari untuk tingkat penuntutan. c. Hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan. Made melanjutkan, dari penjelasan Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , dapat diketahui, penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang ke pengadilan dilakukan jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari). Ketentuan itu bersesuaian dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 1 angka 6 KUHAP. Apabila mengacu Pasal 72 ayat (5) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, melihat adanya kewenangan penuntut umum mengenai surat permintaan keterangan tertulis harta kekayaan yang harus ditandatangani Jaksa Agung atau Kepala Kejati, dalam hal permintaan diajukan jaksa penyidik atau penuntut umum. “Ini berarti penuntut umum yang dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 hanya penuntut umum di bawah Jaksa Agung atau di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi, sehingga tidak termasuk penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan

Korupsi tidak berada di bawah Jaksa Agung atau Kajati, melainkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang , Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang . Hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diserahkan kepada penuntut umum pada Kejari setempat, untuk selanjutnya penuntut umum Kejari melakukan penuntutan ke pengadilan. “Hukum acara pidana tidak dapat dianalogikan. Kewenangan tersebut tidak jatuh dari langit, tapi harus ditentukan oleh hukum. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang harus diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi pada dasarnya Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan menuntut perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ke pengadilan.”⁵⁹ pada tahun 2015 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor register 77/PUU-XII/2014 yang menafsirkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa “menimbang bahwa mengenai pasal 76 ayat (1) UU 8/2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri yang menurut pemohon hanya penuntut umum pada kejaksaan RI yang

⁵⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hoc-persoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu> diakses pada tanggal 26 April 2015

berwenang sedangkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang, menurut Mahkamah Konstitusi penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Apabila tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum”⁶⁰. Hal tersebut menurut penulis bertentangan dengan asas *opportunitas* yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia, salah satu bentuk dari asas *opportunitas* adalah *dominus litis* yang berarti tidak ada instansi yang berwenang dalam melakukan penuntutan selain instansi kejaksaan. Hal ini kemudian tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana pendapat dari Yance Arizona salah satu dosen fakultas hukum president university, Jakarta mengemukakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma⁶¹. Jikalau kita melihat secara seksama maka telah terjadi konflik norma antara norma dari yang kemudian ditafsirkan oleh Putusan

⁶⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

⁶¹ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 3 Agustus 2015

Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dengan sebuah bentuk dari asas *opportunitas* yakni *dominus litis*, sehingga putusan pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 perihal penafsiran pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memiliki kepastian hukum sehingga aturan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Penuntutan atas Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memiliki aturan yang pasti dalam hukum.

B. Kedudukan Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Masa Yang Akan Datang

Hukum selalu menjadi bahan perbincangan seluruh khalayak masyarakat, mulai dari perbincangan bagaimana hukum seharusnya, bagaimana hukum yang Rakyat Indonesia cita-citakan hingga bagaimana hukum dalam suatu aturan, untuk mengenal hukum jauh lebih dalam maka digunakanlah cara pendekatan hukum. Penggunaan konsep yang menggabungkan antara teori hukum alam modern, teori positivis dan teori empiris, dimaksudkan agar apapun yang dihasilkan dengan penggunaan secara seimbang dari ketiga pendekatan dalam mempelajari

hukum sebagai berikut, akan menjadi lebih optimal. Ketiga jenis pendekatan itu adalah :⁶²

- **Pendekatan ‘jurisprudential’ atau kajian normatif hukum** yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis)
- **Pendekatan empiris atau ‘legal empirical’** yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*) dan seperangkat perilaku (*behavior*).
- **Pendekatan filsufis** yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, di antaranya kajian tentang moral keadilan.

Dalam keterkaitan antara ketiga pendekatan ilmu hukum tersebut maka hukum pada umumnya dapat dibedakan ke dalam:⁶³

- **Ius constituendum** : hukum ideal yang diharapkan berlaku, bidang ini didekati dengan pendekatan filsufis,
- **Ius contitutum** : hukum positif, yaitu hukum yang diberlakukan oleh suatu negara tertentu, untuk suatu waktu tertentu, tetapi belum tentu didalam realitasnya benar-benar berlaku,

⁶² Achmad Ali. *Op.cit.*, Hlm. 178

⁶³ *Ibid.* Hlm. 181

- **ius operatum** : hukum yang di dalam realitasnya benar-benar berlaku.

Berbicara mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang apabila kita kaitkan diantara kelompok-kelompok hukum melalui tiga pendekatan yakni pendekatan normatif hukum, pendekatan empiris hukum dan pendekatan filsufis maka perbincangan akan lebih banyak berada dalam tataran hukum ideal yang diharapkan berlaku dan diimpikan oleh setiap kalangan masyarakat atau **ius constituendum**. Tapi sebelum itu terlebih dahulu kita harus melihat secara hukum yang diterapkan dalam masyarakat (**ius constitutum**) perihal kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan juga kita perlu melihat bagaimana realitas yang terjadi dikalangan masyarakat (**ius operatum**) perihal kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Setelah kita mengkaji bagaimana hal tersebut didalam sudut pandang hukum yang diberlakukan dan juga setelah kita mengkaji dari sudut pandang realitas maka kita dapat mengambil sebuah deksriptif atau sebuah gambaran mengenai kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penuntutan atas tindak

pidana pencucian uang di masa yang akan datang dan ideal bagi Rakyat Indonesia.

Pada dasarnya jika kita melihat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 6 huruf b menjelaskan salah satu kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi memeriksa, mengadili dan mengutus suatu perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) berasal dari tindak pidana korupsi. Jika kita melihat secara seksama perkara tindak pidana pencucian uang bisa diperiksa, diadili, dan diputus perkaranya dalam pengadilan tindak pidana korupsi asal tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi, aturan ini yang pada dasarnya memberikan kesempatan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang, tetapi pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Komisi Pemberantasan Korupsi hanya satu-satunya instansi yang dapat melakukan penuntutan terhadap terdakwa suatu tindak pidana korupsi ? Jawabannya tentulah tidak. Di Indonesia juga dikenal suatu instansi yang berwenang melakukan penuntutan yakni instansi Kejaksaan bahkan instansi Kejaksaan ini merupakan dominus litis dalam sebuah penuntutan yang berarti tiada instansi yang berwenang untuk melakukan suatu penuntutan kepada terdakwa melainkan instansi Kejaksaan.

Selain daripada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 76 tidak menjelaskan siapa yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, ditambah dengan penjelasan pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mengatakan cukup jelas. Hal tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Namun, hal yang menggugurkan kesemuanya adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan pada pasal 6 huruf c bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Apabila kita melihat secara seksama maka Komisi Pemberantasan Korupsi hanya diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi saja tidak untuk tindak pidana lainnya khususnya tindak pidana pencucian uang. Menambahkan mengenai kewenangan Peter de Haan menyatakan bahwa kewenangan pemerintah tidak jatuh dari langit tetapi ditentukan oleh suatu Undang-Undang

(*Overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*)⁶⁴. Karena tidak ada satu aturan pun yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang maka secara **Ius Constitutum** atau dalam hukum positif Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Setelah berbicara dalam tataran Ius Constitutum maka selanjutnya untuk membuat kesimpulan bagaimana kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang maka kita juga harus mengkaji secara **Ius Operatum** atau melihat realita yang terjadi di masyarakat.

Berbicara mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang jika kita kaji secara **Ius Operatum** atau berbicara mengenai apa yang terjadi di masyarakat pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Banyak kasus yang terjadi dimana penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan kepada terdakwa selain dari tindak pidana korupsi juga melakukan penuntutan kepada terdakwa dengan tindak pidana pencucian uang misalnya pada kasus Nazaruddin di Hambalang, kasus Djoko Susilo, kasus Ahmad Fathanah dan kasus yang diusut baru-baru ini yakni pada

⁶⁴ P. de Haan. *Op.cit.*, Hlm. 49.

akhir tahun 2014 yakni bupati Karawang yang dituntut oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri tidak memiliki kewenangan dalam sebuah aturan tertulis dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang akan tetapi penegakan hukum di Indonesia tidak hanya mencari kepastian hukum saja, tetapi juga bertujuan untuk mencari keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Apakah kemudian sangat adil kiranya jikalau seorang terdakwa yang telah melakukan pengaburan harta kekayaannya atas hasil korupsi dengan melakukan tindak pidana pencucian uang dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum disuatu persidangan pemeriksaan biasa akan tetapi di vonis bebas lepas oleh hakim karena penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tersebut tidak mempunyai memiliki aturan yang jelas dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, apakah kemudian hal ini adil kalangan masyarakat yang menjadi korban dari tindak pidananya itu sendiri ? ini sama halnya ketika kita menganalogikan sebuah metilon yang tidak diklasifikasikan sebagai narkoba baik narkoba golongan 1,2 ataupun narkoba golongan 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi menimbulkan efek yang sama dengan narkoba golongan 1, pertanyaan yang kemudian apakah adil ketika seorang terdakwa yang telah terbukti mengedarkan metilon ini secara sah

dan meyakinkan menurut hukum dipersidangan akan tetapi divonis bebas oleh hakim karena bukan termasuk dalam klasifikasi narkoba meskipun efek yang ditimbulkan sama dengan narkoba golongan 1?

Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.⁶⁵ Gustav Radbruch mengingatkan bahwa dalam produk perundang-undangan (*Gezetz*) kadang kala terdapat *Gezesliches Unrecht*, yakni ketidakadilan didalam undang-undang.⁶⁶ Kemudian jikalau kita kaitkan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dan ditinjau dari segi **lus Operatum** atau yang terjadi di masyarakat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang hal tersebut meskipun didukung dengan adanya putusan pengadilan tinggi kepada Luthfi Hasan Ishaaq yang kemudian divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana korupsi selama 16 tahun⁶⁷.

Setelah kita mengkaji dari sudut pandang **lus Constitutum dan lus Operatum** maka sejatinya kita dapat menggambarkan bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang secara ideal dalam hal kewenangan melakukan penuntutan dalam tindak

⁶⁵ Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun. 2013. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. Hlm 179

⁶⁶ *Ibid.*, Hlm. 179.

⁶⁷ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor register 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

pidana pencucian uang (**lus Constituendum**). Berbicara mengenai hal yang ideal dimasa depan atau hukum yang kita impikan tidak akan lepas dari tiga tujuan hukum menurut ajaran konvensional yakni :

- **Ajaran Etis dengan Tujuan Keadilannya.**

Apa yang dimaksud dengan keadilan? Adil itu seperti apa dan tidak adil itu seperti apa ? pada dasarnya untuk menjawab keadilan itu bukan perkara yang mudah, keadilan merupakan hal yang abstrak dan sangat bersifat subjektif, apa yang menurut saya adil belum tentu teman saya merasakan hal tersebut adil. Ada beberapa definisi dari pakar berkenaan dengan apa itu keadilan, ada yang mengaitkan keadilan dengan peraturan politik negara, sehingga ukuran tentang apa yang menjadi hak atau bukan, senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh negara. Ada juga yang memandang keadilan dalam wujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus, untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang. Juga ada yang melihat keadilan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum, yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Demikian juga ungkapan tentang 'keadilan', ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan, dan berada bukan hanya diruang persidangan pengadilan, melainkan di manapun, dan harus dibersihkan dari kekotoran scandal dan

korupsi.⁶⁸ Bahkan dengan nada humor, Benjamin N. Cardozo seolah memperlakukan keadilan sebagai seorang wanita, yang tidak untuk diserbu habis, melainkan untuk dirayu beliau juga mengatakan bahwa proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan, yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik.⁶⁹ Dengan demikian berdasarkan ungkapan di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya tidak ada keadilan yang sempurna yang ada hanyalah pencapaian keadilan dalam kadar tertentu saja. Adapun yang sebagian orang yang meyakini bahwa keadilan adalah kelayakan, N. E. Algra menyatakan bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan : “itu adil”. Tetapi mengatakan: “hal itu saya anggap adil”. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.⁷⁰

- **Ajaran Utilitis dengan Tujuan Kemanfaatannya.**

Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis, sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan

⁶⁸ Achmad Ali. *Op.cit.*, Hlm. 222

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitis. Penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.⁷¹ Salah satu pakar ajaran utilitarian ini adalah Jeremy Bentham yang merupakan seorang filsufm ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk menenun dari benang “prinsip kegunaan” menjadi sebuah kain doktrin dalam etika dan ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai mazhab utilitis. Utilitarianisme atau *utilism* lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran in adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan disini sebagai tujuan hukum.⁷² Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam suatu masyarakat. Prinsip manfaat yang dinyatakan secara kabur,

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 272

⁷² Aburaera Sukarno, Muhadar dan Maskun. *Op.cit.*, Hlm. 111

jarang sekali dibantah umum; prinsip ini bahkan dipandang sebagai hal yang umum ditemukan dalam bidang politik dan moral. Namun, kesepakatan umum yang sifatnya nyaris universal ini baru tampak di permukaan. Prinsip ini tidak menghasilkan gagasan yang sama dan nilai yang sama; prinsip ini tidak menghasilkan cara penalaran yang seragam dan logis.⁷³

- **Ajaran Dogmatik Hukum dengan Kepastian Hukumnya**

Aliran ini bersumber dari pemikiran kaum yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum, yang dipersepsikan hanya sekedar kepastian undang-undang⁷⁴. Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apa pun kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua

⁷³ Jeremy Bentham. *Op.cit.*, Hlm. 25

⁷⁴ Achmad Ali. *Op.cit.*, Hlm. 284

kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.⁷⁵ Pada dasarnya kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷⁶ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Jika kita dapat mencermati tiga tujuan menurut aliran-aliran yang berbeda sesuai ajaran konvensional maka kita dapat menyimpulkan ada tiga hal yang ingin dituju oleh hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut yang sangat diperlukan untuk

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana. Hlm. 136

⁷⁶ *Ibid.*, Hlm. 137

hukum yang kita impikan atau hukum yang ideal dimasa yang akan datang.

Hukum sendiri pada dasarnya diciptakan untuk membuat keadilan dari keadilan tersebut harusnya memiliki sebuah kepastian hukum dan pada saat diimplementasikan kepada masyarakat dapat bermanfaat. Ketiga tujuan hukum tersebut seharusnya berjalan secara beriringan dan tidak hal yang paling dominan diantara ketiga tujuan tersebut. Pakar Hukum Indonesia, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa⁷⁷ "kalau dikatakan bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan keadilan, itu berarti hukum itu identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan".

Terkait dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang dari sudut pandang yang hukum yang dicita-citakan dimasa yang akan datang Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang. Jika kita kembali melihat apa itu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan maka menurut penulis menganggap jika kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang maka ketiga tujuan hukum tersebut sangat sulit diraih. Karena dalam konsep keadilan diperlukan kepastian hukum dan dalam kepastian hukum diperlukan keadilan yang berdampak

⁷⁷ Achmad Ali. *Op.cit.*, Hlm. 222

sistemik dan bermanfaat bagi masyarakat. Apa gunanya jikalau konsep keadilan yang kita tempuh tidak memiliki kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat ?. tentu saja masih sering akan terjadi overlapping dan tidak jelasnya aturan-aturan. Oleh karena itu dari sudut pandang hukum yang kita cita-citakan sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa yang akan datang diberikan wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang agar tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai, sehingga kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa yang akan datang dalam hal melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang tidak menjadi hal yang kontroversial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya menjelaskan redaksi kata penuntut umum , sementara yang kita ketahui bahwa penuntut umum menurut KUHAP merupakan jaksa. Jaksa sendiri ada yang bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dan ada yang bekerja pada instansi Kejaksaan, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang
2. Secara *Ius Constitutum* atau apa yang berlaku dalam sebuah aturan ataupun lebih dikenal dengan undang-undang maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang, berbeda halnya jika kita berbicara dalam tataran *Ius Operatum*

atau secara empirik dengan melihat apa yang terjadi dalam masyarakat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dirasa perlu untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang dimana tindak pidana pencucian uang merupakan double-track criminality dimana terdapat tindak pidana asal dan lanjutan, dalam hal ini jikalau tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari kejahatan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal secara empiris Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melakukan penuntutan seperti pada kasus Luthfi Hasan Ishaaq, Djoko Susilo dan lain sebagainya. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi secara ius constituendum harus memiliki tiga tujuan hukum didalamnya yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan revisi dan ditambahkan kewenangan didalamnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Hal tersebut dirasa perlu agar kedudukan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang

menjadi apa yang kita cita-citakan atau ideal (Ius Constituendum) yakni memiliki kepastian hukum berupa aturan yang mengatur , memiliki nilai keadilan bagi rakyat Indonesia dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

2. Pemerintah seyogyanya dalam membuat produk hukum harus jelas dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak terjadi lagi saling tumpah tindihnya sebuah aturan dan contra legem atau konflik norma dalam sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur:

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana .

Wirjono Prodjodikoro. 1967. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sumur Bandung

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, cetakan ke-2

Adiwarman,Arman Nefi,Ivan Yustiavandana. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm

A.S. Mamoedin. 1997. *Analisis Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Rafflesia.

Carl Edward Ty Williams. 1998. *The Effects of Domestic Money-Laundering Countermeasures on the Banker's Duty of*

Confidentiality. Canada : CARSWELL, a division of Thomson Canada.

Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn : West Publishing Co.

Sarah N. Welling. *Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*,

Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. 1992. *The Money Trail (Confiscation of Proceeds Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*. Sydney : The Law Book Company Limited.

Pamela H. Bucy. 1992. *White Collar Crime: Cases and Materials*, St. Paul, Minnesota : West Publishing Co.

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No.3 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003)

Michael Levi and Peter Reuter. 2006. *Money Laundering*. Chicago : The University of Chicago Press.

Jeremy Bentham. 2013. *Teori Perundang-Undangan*. Bandung : Nuansa Cendekia dan Nusamedia.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. *Jurnal Pro Justitia*, Universitas Parahyangan, Bandung, Edisi IV, Tahun 2000

P. de Haan, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, Deel 1*, Kluwer, Deventer, Tahun 1986

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, *Jurnal Pro Justitia*, Nomor 1, Tahun XVI, Januari 1998

Tim Redaksi Varia Pengadilan. 2014. *Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXIX No.340 Maret 2014*. Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor .1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor register perkara 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Sumber Literatur Website

<http://hukummulia.blogspot.com/2009/04/hukum-per-undang-undangan.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3eccc96910/hakim-ad-hoc-persoalkan-kewenangan-kpk-menuntut-tpu>

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>